
**OPTIMALISASI PENGARUH DAN EKISTENSI KOPERASI
SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN DAERAH**

Hainim Kadir dan Yusbar Yusuf

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi, disamping badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Dalam perekonomian masing-masing mempunyai kontribusi sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangannya di Indonesia koperasi belum dapat memberikan kontribusi berarti. Malahan ada pernyataan yang keras mengatakan bahwa Indonesia telah gagal dalam melakukan pembangunan koperasi. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi karena, pertama; konstitusi Indonesia UUD 1945 memberikan dasar dan dukungan hukum, politik maupun kebijakan pembangunan dan kedua; adanya komitmen yang kuat dari pemerintah selama ini dalam berbagai program pembangunan yang mendorong tumbuh kembangnya koperasi.

Mengapa gagal membangun koperasi yang kuat ? banyak polemik tentang hal ini. Akan tetap dari polemik-polemik tersebut dapat disimpulkan mengapa gagal membangun koperasi yang kuat, pertama; karena tidak atau kurang dipahami makna sebenarnya dari koperasi sebagai mana dalam jatidiri koperasi tentang batasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Kekurangan pemahaman ini membuat koperasi salah bentuk, keliru memahami manajemennya dan kehilangan sifat sebagai organisasi yang berbasiskan anggota-anggota (orang) dan kedua; umumnya membangun koperasi atas dasar pendekatan makro, politis, dan sering berputar-putar pada tatanan wacana (Ibnoe Soedjono, 2003).

Sebab-sebab kegagalan membangun koperasi yang dikemukakan di atas, juga dilengkapi oleh kondisi eksternal atau aspek-aspek di luar perkoperasian. Kedepan bagaimana mengatasi permasalahan koperasi secara proporsional dari permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus dijawab. Untuk itu bagaimana membangun koperasi sesuai dengan prinsip, nilai dan identitas koperasi merupakan langkah strategis awal yang penting untuk dilakukan.

1. PRINSIP DAN NILAI KOPERASI

Dipahami bahwa koperasi mempunyai dua sisi yang sebenarnya bisa sejalan yaitu perkumpulan dan perusahaan. Akan tetapi sering dilihat sebagai perkumpulan dipahami koperasi adalah lembaga sosial. Sebaliknya sebagai perusahaan dipahami adalah suatu badan usaha yang dikendalikan oleh modal untuk mencari keuntungan. Akibat dari persepsi yang demikian, banyak koperasi yang dibangun sebagai suatu “hybrida” yang memiliki ciri-ciri koperasi tertentu, akan tetapi pola berfikir dan tindakannya sulit dibedakan dari sebuah korporasi yang berbasiskan modal.

Sebagai wahana usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara bersama-sama, koperasi merupakan suatu badan yang mempunyai ciri sendiri. Koperasi adalah sebuah organisasi yang merupakan gerakan bersama untuk menolong diri sendiridan bertumpuh pada kekuatan bersama. Meskipun demikian koperasi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata.

Terkait itu koperasi mempunyai tiga aspek utama, yaitu (i) ekonomi (ii) moral dan (iii) bisnis. Namun jika diamati lebih jauh ketiga aspek ini merupakan sumber kekuatan utama untuk mengikat kerjasama anggota dalam koperasi dan sekaligus dapat memberikan rangsangan atau dorongan kepada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat (Noer Soetrisno, 2001).

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai ciri yang pemilikan dan pelanggannya adalah sama. Prinsip ini oleh Munkner disebut sebagai suatu prinsip identitas (Munkner, 1989). Aspek ini begitu pentingnya dalam kehidupan sebuah koperasi, karena tanpa prinsip pemilikan-pelanggan tersebut koperasi akan kehilangan ciri dan identitasnya. Pengingkaran terhadap prinsip ini juga akan melahirkan orientasi mencari keuntungan semata dan melupakan pengembangan dan terkaitan dengan para anggota yang memiliki kepentingan untuk dilayani oleh koperasi. Prinsip identitas ini sebenarnya menjadi ciri utama koperasi serta harus dipertahankan oleh koperasi melalui upaya khusus dengan memberi nilai yang kuat agar prinsip ini dapat dipertahankan. Prinsip identitas sangat penting walaupun banyak lagi prinsip-prinsip lain yang menjadi ciri-ciri koperasi.

Pandangan tentang prinsip koperasi di atas sengaja ditekankan di sini karena dalam sejarahnya ketika berbagai bentuk koperasi perintis didirikan diberbagai negara seperti Inggris, Jerman Barat, Prancis, Denmark dan negara lainnya, justru identitas itulah yang ditekankan terlebih dahulu. Baru ketika mereka ingin menjadikan sebagai suatu gerakan yang besar, maka nilai-nilai dasar tersebut tidak lagi dominan mewarnai koperasi. Dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut juga tumbuh secara bervariasi mengikuti perkembangan dan kesepakatan bersama.

Adalah melalui ICA kemudian dirumuskan apa yang menjadi nilai dasar inti bagi gerakan koperasi di dunia. Konggres ICA di Stockhloem pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama yaitu :

1. Demokrasi (democracy), prinsip ini menekankan pada keputusan-keputusan koperasi diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi. Di dalam koperasi dianut dasar penegakan demokrasi melalui ciri pemungutan suara satu orang satu suara dalam koperasi primer dan proporsional dengan jumlah pada koperasi sekunder serta anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam koperasi.
2. Partisipasi (participation), wujud nyata prinsip ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan kegiatan usaha dan lain-lain.
3. Kejujuran (honesty), maknanya para penyelenggara koperasi mencerminkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya.
4. Kepedulian (caring), prinsip ini memberikan ciri khusus kepada koperasi sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas disekitar wilayah kerjanya.

Keempat nilai dasar tersebut telah menjadi pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para anggotanya. Keempat nilai tersebut secara implisit dapat menjadi pengikat non-ekonomis dalam menjamin proses usaha koperasi yang pada akhirnya akan dapat menegakkan identitas koperasi.

Dalam kenyataannya nilai dasar tersebut juga dapat bervariasi dari suatu koperasi atau negara ke yang lainnya. Hal ini secara umum dapat dilihat dari perbedaan mazhab (paham) yang dianutnya. Pada mazhab yang menekankan pada fungsi koperasi sebagai suatu upaya untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar, maka unsur demokrasi dan berpartisipasi menjadi elemen menonjol. Karena kedua nilai itulah yang menjadi elemen dasar untuk mengembangkan kekuatan koperasi dan merupakan dasar utama untuk menunjukkan kekuatan kerjasama pasar bagi para anggotanya.

Sementara pada kelompok penganut mazhab persemakmuran akan cenderung melihat keadilan sosial sebagai elemen pentingnya. Karena dengan nilai tersebut tujuan untuk mengembangkan sistem koperasi dan negara kesejahteraan akan secara mudah diwujudkan.

Terlepas dari adanya perbedaan diatas memang nampaknya demokrasi adalah elemen universal bagi suatu koperasi yang sehat dan kompetitif. Kemampuan kompetitif ini menjadi dasar kehadiran koperasi sebagai tolak ukur pasar yang ditunjukkan pada upaya korektif secara bersama oleh masyarakat.

Dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan efisiensi memang menjadi dasar penting atau prasyarat untuk mewujudkan suatu keadilan, karena hanya dengan suatu sistem produksi dan distribusi yang efisien kita akan dapat melahirkan kewajiban pemberian imbalan jasa untuk menuju keadilan yang lebih baik. Demokrasi adalah nilai dasar yang penting dan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara sadar sesuai dengan kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap informasi yang disediakan oleh pasar.

2. IDENTITAS KOPERASI

Telah dikemukakan bahwa identitas adalah merupakan prinsip yang paling dasar bagi hadirnya sebuah koperasi yang mandiri, efektif dan efisien. Karena itu identitas harus dijadikan modal dan faktor penentu menuju suksesnya koperasi. Di negara berkembang banyak koperasi maju dan dapat berkembang tanpa harus terhimpit dengan arah kadar kekentalan identitas tersebut. Karena sejak awal koperasi dikembangkan melalui mekanisme intervensi negara. Oleh sebab itu keberhasilan bisnisnya tidak terlalu beriringan dengan kadar kemandiriannya.

Prinsip identitas merupakan sumber kekuatan koperasi. Namun prinsip identitas juga dapat menjadi kekangan bagi koperasi itu sendiri. Hal ini terjadi jika koperasi telah tumbuh menjadi benar dan melampaui kebutuhan anggotanya.

Suatu koperasi yang berhasil mengembangkan dirinya dan mengangkat taraf hidup anggotanya akan menjadi tidak ekonomis lagi bila hanya bertumpu pada layanan bagi anggotanya saja, sehingga identitas pemilik-pelanggan hanya bersifat sepihak saja.

Dalam hal ini anggota akan tetap dapat memenuhi tuntutan untuk loyal kepada koperasi sebagai pelaksanaan prinsip identitas. Tetapi demi efisiensi koperasi harus mengembangkan keluar anggotanya guna memanfaatkan kelebihan kapasitasnya. Dengan jalan ini diharapkan koperasi tidak mengabaikan prinsip identitasnya.

Kecepatan suatu koperasi mencapai tahapan ini akan sangat tergantung pada batasan keanggotaannya yang diberlakukan oleh koperasi atau ketentuan undang-undang perkoperasian suatu negara. Semakin kecil lingkup batasan kelompok keanggotaannya semakin cepat kondisi semacam itu dihadapi koperasi.

Gambaran diatas merupakan faktor kemajuan internal yang demi alasan efisiensi dan daya saing telah menjadikan koperasi untuk tidak sepenuhnya tunduk pada identitasnya sendiri. Disamping itu masih ada faktor internal lainnya, jika misi koperasi untuk mengkoreksi kegagalan mekanisme pasar telah selesai dan layanan pasar telah efisien. Dengan kondisi seperti itu dapat saja identitas tersebut tidak dipatuhi anggota, dan koperasi hanya mempunyai fungsi yang sifatnya *intangibile*.

Di samping itu juga sangat mungkin kekentalan identitas akan kendor karena adanya perubahan teknologi yang mampu memecahkan masalah indivisibility dari mesin-mesin atau investasi. Apalagi dalam perkembangan sekarang yang telah banyak teknologi yang layak dimanfaatkan untuk skala rumah tangga bahkan personal. Perkembangan yang bersifat eksternal ini akan makin mempersempit pengelolaan bersama dan meningkatkan kompetisi yang semakin tajam. Keadaan ini akhirnya mengancam koperasi untuk memecahkan kehematan dari adanya skala yang lebih besar.

Faktor eksternal lainnya yang dapat melonggarkan kekentalan identitas adalah perubahan struktur pasar yang mampu menghilangkan hambatan struktural. Misalnya jaringan informasi yang semakin tertata telah mendekatkan sumber-sumber produksi dan jalur distribusi barang yang semakin pendek.

Koperasi di negara-negara maju merespon fenomena perubahan itu dengan aktif. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan instrumen baru untuk mengikat anggota tetap dalam jaringan layanannya. Model yang dapat dijadikan contoh adalah model *direct charge cooperative* yang banyak dikembangkan di Kanada. Pada dasarnya model ini bersifat netral karena prinsip tersebut hanya mungkin dikembangkan dengan adanya pelopor atau warisan sukses koperasi sebelumnya. Karena koperasi tidak lagi diprakarsai dan dimodali oleh para anggotanya, tetapi hanya pemeliharaan untuk kelangsungannya saja yang dijaga dengan mekanisme koperasi.

Berbagai gambaran dan pengalaman empiris diatas memperlihatkan bahwa prinsip identitas tidak selalu implisit dalam setiap koperasi, tetapi akan berkembang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal koperasi. Prinsip identitas juga dapat dijaga dengan suatu inovasi baru baik dibidang teknologi atau membangun ketergantungan lainnya. Jika prinsip identitas dapat bergeser, maka tentunya nilai yang menjadi dasar untuk mempertahankannya juga dapat berkembang memenuhi tuntutan kemajuan organisasi dan lingkungan.

Nilai dasar koperasi dapat tererosi bukan saja oleh faktor yang telah diuraikan dimuka, tetapi dapat terjadi karena dampak negatif dari adanya campur tangan pemerintah. Nilai yang rawan terhadap intervensi berlebihan adalah nilai kemandirian dan demokrasi, karena sangat sering bantuan pemerintah diikuti dengan pengawasan dan pengaturan yang berlebihan sehingga mengekang dan melahirkan ketergantungan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan erosi terhadap nilai dasar koperasi.

Pemerintah sebenarnya menyadari akan hal ini tetapi seringkali, tidak tahu jalan keluarnya atau bahkan cukup banyak yang terjebak dalam pandangan untuk menyelamatkan lembaga koperasinya ketimbang mengamankan tujuan dikembangkannya mekanisme koperasi. Penyakit inilah yang akhirnya menimbulkan ketergantungan berkepanjangan dan menyeret koperasi menjadi beban bukan alat perjuangan anggota.

Untuk mengatasi penyakit itu tidak ada lain kecuali mengembalikan koperasi untuk sepenuhnya dapat berpegang pada nilai dasarnya terutama yang menyangkut otonomi dan demokrasi. Tanpa dikembalikannya nilai dasar tersebut selamanya koperasi akan kering dan tidak akan mampu menghasilkan koperasi yang dapat berpegang kuat pada prinsip identitas yang menjadi sumber kekuatannya.

Globalisasi sebagai perkembangan baru memang akan membuka dimensi baru yang mengarah kepada saling ketergantungan dan semakin ditaatinya perinsip-perinsip persaingan sehat. Dalam situasi yang demikian kelangsungan suatu usaha maupun pembangunan ekonomi suatu negara akan sangat tergantung pada kemampuan menciptakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan tidak lagi terbatas pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang diperoleh karena hadiah dari alam.

Dalam penciptaan keunggulan kompetitif unsur efisiensi menjadi semakin menonjol. Karena itu koperasi yang dari semula dikembangkan dalam mekanisme pasar tidak akan mengalami persoalan yang berarti. Ia akan tetap dapat bersaing dan menjalankan usahanya.

Bahkan baginya hal itu telah melahirkan kesempatan baru untuk membuka *cooptrade*, secara lebih luas baik dengan sesama koperasi maupun non koperasi. Hal ini dapat terjadi karena nilai dasar koperasi telah digunakan secara tepat sejak awal membangun landasan bagi perkembangannya, dan setiap tantangan baru dijawab dengan merespon pasar sesuai tuntutan.

Di negara berkembang mungkin mengalami pengalaman yang beraneka ragam. Karena perkembangan koperasi yang lepas dari kontrol pasar menimbulkan ketergantungan berkelanjutan baik sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan khusus untuk perlindungan bagi koperasi. Sehingga sering dijumpai koperasi tanpa prinsip identitas dan secara bisnis tidak memiliki keunggulan kompetitif dalam mekanisme pasar yang sehat.

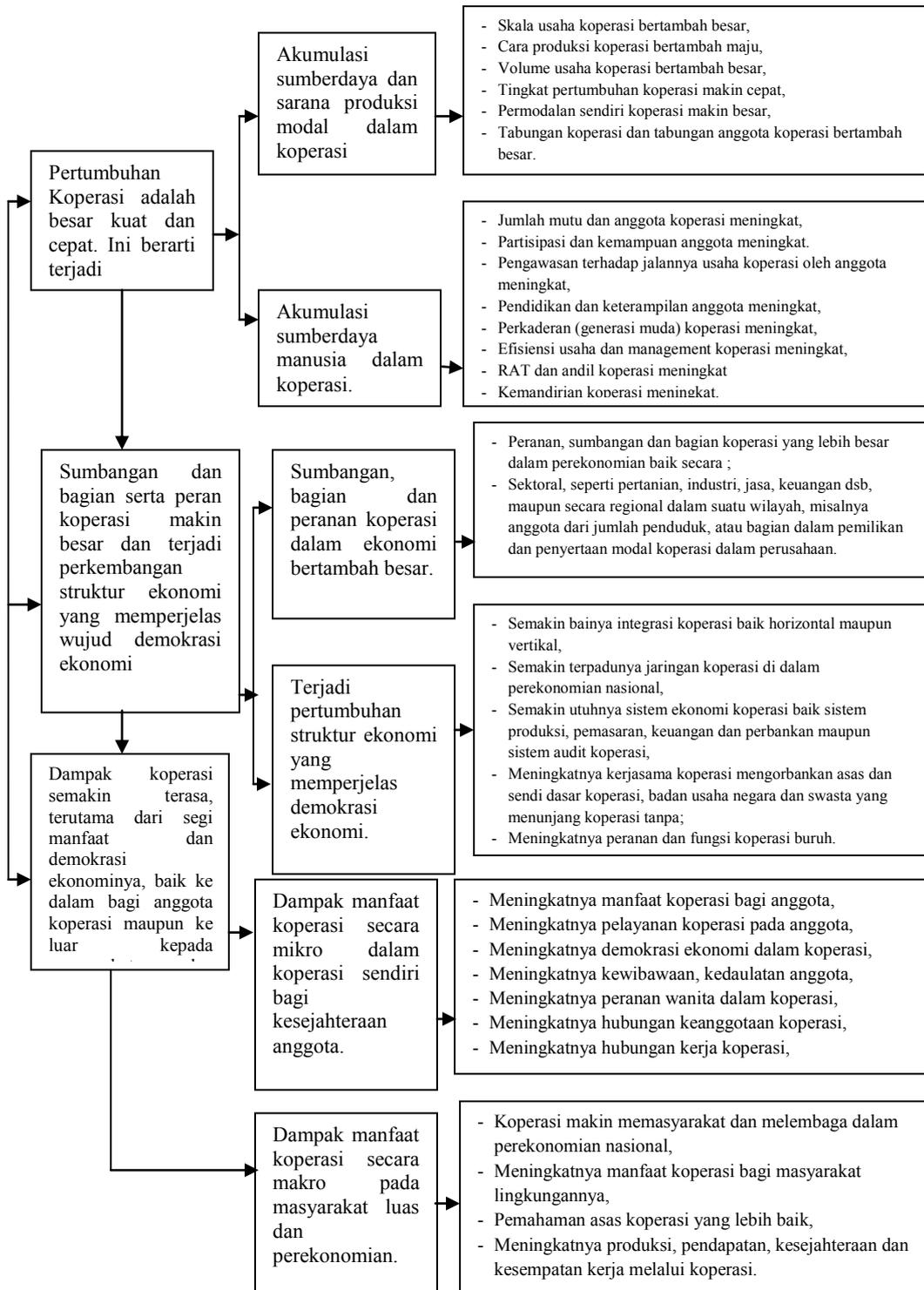
Dalam merespon pengalaman ini sebenarnya nilai dasar koperasi dapat menjadi sumber untuk memperbaiki posisi keunggulan kompetitifnya, apalagi jika lingkungan kemiskinan masyarakat anggotanya sudah secara nyata berkurang. Tanpa kembali pada nilai dasar, maka koperasi akan tetap menjadi beban proteksi berkepanjangan dan tidak dapat menjadi alat perjuangan ekonomi para anggotanya sendiri.

Dapat disimpulkan nilai dasar yang menjadi sumber kekuatan koperasi terletak pada keperdulian dan demokrasinya. Karena muatan sosial tersebut tetap membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya dan dengan karakter demokrasi yang tidak mengenal batas pemilik modal, koperasi benar-benar menjamin harkat kemanusiaan yang demokratis.

3. KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN

Apabila telah dapat dibangun koperasi sesuai dengan prinsip, nilai dan identitasnya, maka bagaimana mengoptimalkan pengaruh dan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian sangat bergantung pada besar, kekuatan dan dampak keberadaan koperasi. Untuk menentukan besar, kekuatan dan dampak ini, sangat tergantung pada tiga faktor yaitu, (1) Co-operative growth, (2) Co-operative share dan (3) Co-operative effect (Wahyu Sukoco, 1985). Bagaimana keterkaitan tiga faktor ini dalam mempengaruhi koperasi sebagai soko guru perekonomian (daerah) dapat dijelaskan secara skematis berikut.

Bagan : Tiga Faktor Penentu Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian



Gambaran skematis yang dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa faktor-faktor penentu koperasi sebagai soko guru perekonomian bersinergi atau berakselerasi secara receiprocal. Faktor-faktor penentu koperasi sebagai soko guru suatu perekonomian dapat dioptimalisasikan dengan menserasikan semangat koperasi dengan koperasi sebagai organisasi.

Selanjutnya, perekonomian daerah akan dapat tumbuh untuk mengisi secepat tujuan pembangunan yang dicita-citakan yaitu meningkatkan social welfare masyarakat daerah adalah dengan mensinergikan kekuatan soko guru perekonomian. Dengan kata lain tumbuh kembangnya sektor swasta, akan mendorong tumbuh kembangnya sektor pemerintah dan koperasi dan begitu sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Nurdin dan Yusdy Achmad : beberapa Aspek historis Perkembangan Koperasi indonesia, UI Press, Jakarta, 1987.
- Hans. H. Munkner : Cooperative Ideas, principles and Practices, Morborg, German, 1989.
- Ibnoe Soedjono : Instrument pengembangan Koperasi, LSP2I, Jakarta, 2003.
- M Suparmoko : Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan daerah, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Mubyarto : Prospek Otonomi daerah dan perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Mudrajad Kuncoro : Otonomi dan pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Intrans, Jakarta, 2001.
- Panji Anogoro & Ninik Widiyanti : Dinamika Koperasi, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003.
- Sri Edi Swasono : Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia, UI Press, Jakarta, 1987.
- Wahyu Sukotjo : Koperasi Indonesia : Bersama Dalam Kemakmuran dan Makmur Dalam Kebersamaan, UI Press, Jakarta, 1987.